

Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)

¹Nur Ainun, ²Afrah Junita, ³Muhammad Salman

^{1,2,3}Akuntanasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email : [1nurainunnurainun1@gmail.com](mailto:nurainunnurainun1@gmail.com), [2afrahjunita77@gmail.com](mailto:afrahjunita77@gmail.com),
[3muhammadsalman@unsam.ac.id](mailto:muhammadsalman@unsam.ac.id)

Corresponding Mail Author : nurainunnurainun1@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the effect of the Flypaper Effect on General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditures with Regional Original Income as a Moderating Variable (Case Study in the Government of Aceh Tamiang District). The population of this study is in the form of Regional Expenditures, General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Regional Original Income (PAD) in 2014-2021 in Aceh Tamiang District. The sampling technique uses the Saturated Sample method where all members of the population are used as samples. The sample in this study is in the form of realization reports regarding Regional Expenditures, General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Regional Original Income (PAD) in 2014-2021 in Aceh Tamiang District, so the number of observations is 8 years. The data analyzed in this study is the documented realization of the Regional Expenditure Budget (APBD) from the Aceh Tamiang Regional Financial Management Agency (BPKD) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website. The results showed that partially the Allocation Fund variable had a positive and significant effect on regional spending in Aceh Tamiang District. Meanwhile, the special allocation fund variable is not significant for regional spending in Aceh Tamiang District. Regional original income has no significant effect on regional spending. Partially local revenue cannot moderate the relationship of general allocation funds to regional spending in Aceh Tamiang district. Partially local revenue cannot moderate the relationship of special allocation funds to regional spending in Aceh Tamiang district. Finally, general allocation funds, special allocation funds, and local revenues together have a positive and significant effect on regional spending in Aceh Tamiang District.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Own Revenue, Regional Expenditure.*

I. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru diantaranya penyelewengan pemerintah daerah akibat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan dana Belanja Daerah. Belanja Daerah saat ini masih menjadi masalah di Indonesia yang belum terselesaikan. Selain itu, dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah. Sebagai

konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Daerahnya, yaitu dengan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam ke pemerintah daerah.

Menurut Maimunah (2006) pada prakteknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintahan daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Tujuan transfer adalah mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standart pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Pada praktiknya, Belanja Daerah lebih menggunakan DAU sebagai sumber dana utama yang oleh pemerintah daerah dilaporkan di perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Chatib (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan Belanja Daerah dengan lebih mengandalkan DAU tanpa mengoptimalkan potensi daerah. Kondisi tersebut yang membuat perkembangan daerah saat ini tidak maksimal.

Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang lebih tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan Pendapatan Asli Daerah. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah. Lebih lanjut Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah. Kondisi inilah yang dalam berbagai literature disebut dengan *Flypaper Effect*.

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespons (belanja daerah) lebih banyak/lebih boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dihitung dengan dana perimbangan dari pada menggunakan kemampuan daerah itu sendiri, kemampuan daerah diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berapa pun bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama. Bila hal ini tidak terjadi maka ada kecenderungan bahwa pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk bantuan pemerintah pusat tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal ini yang disebut dengan *flypaper effect*. Pada penelitian Purbarini dan Masdjojo (2015) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi pada belanja operasi pemerintahan kota di Indonesia. Dana alokasi umum dan dana pendapatan asli daerah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja operasi. Bambang Prokoso secara empiris membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah pusat.

Salah satu Kabupaten Aceh yang Pendapatan Asli Daerah nya masih kecil adalah kabupaten Aceh Tamiang. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Aceh Tamiang 2014-2021 mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh Tamiang 2016-2020

Tahun	PAD	DAU	DAK	BD
2014	97.374.583.496	467.034.124.000	46.182.210.000	897.491.135.765
2015	100.454.203.157	486.741.323.000	153.324.090.000	1.159.082.550.835
2016	114.051.092.364	542.165.803.000	247.089.944.122	1.288.839.478.500
2017	116.246.212.754	532.641.693.000	136.356.846.301	1.286.052.797.603
2018	139.261.841.912	532.641.693.000	163.435.948.924	1.124.418.267.109
2019	128.905.940.324	547.975.351.000	144.139.928.051	1.312.594.266.236
2020	125.638.090.728	493.792.581.000	115.154.690.200	1.193.037.028.708
2021	69.708.344.595	367.595.121.000	67.200.284.170	709.080.353.530

Jika dilihat pada tabel diatas proporsi terbesar dari realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu berasal dari Pendapatan Transfer yang diberikan pemerintah pusat. Artinya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pada tahun 2019 Belanja Daerah memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.1.312.594.266.236 hal ini disebabkan karena terjadinya wabah Covid-19 sehingga meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat yang membutuhkan penerima layanan. Pandemi covid-19 memang memberikan dampak besar bagi beberapa sektor di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain sektor kesehatan yang luar biasa dampaknya, segi sosial, ekonomi juga ikut kena imbasnya. Pada tahun 2020 Belanja Daerah sebesar Rp.1.193.037.028. Bupati Aceh Tamiang menyampaikan kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang bahwa perubahan ini harus dilakukan karena dampak pandemi Corana Virus Disease 2019 (covid-19) sejak awal maret 2020 hingga pada tahun 2020 sangat berpengaruh pada pendapatan daerah. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dan langkah kebijakan yang diambil pada perubahan Anggaran 2020.

Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, tidak terlepas dari peraturan atau qanun dalam mengelola keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Khusus menyangkut pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh yang selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai daerah yang baru berkembang, Kabupaten Aceh Tamiang harus memprioritaskan diri pada kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan secara maksimal. Hal ini perlu dilakukan secara konsisten untuk mendorong terciptanya kekuatan daerah dalam menutupi kekurangan terhadap belanja daerah yang diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang sangat tepat untuk menggambarkan hubungan antara publik atau masyarakat dengan pemerintah. Teori agensi dikenal sebagai teori yang menempatkan dua pihak yaitu *principal* dan *agent* dalam suatu hubungan yang korelatif. Seorang pemilik modal atau kekuasaan adalah prinsipal yang mendelegasikan kekuasaan dan modalnya kepada penerima kuasa dan modal yaitu agen.

Belanja Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2016) menjelaskan Dana alokasi umum adalah dana transfer yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh pengalokasian Dana alokasi umum yang relatif besar.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yakni kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang menjadi prioritas nasional.

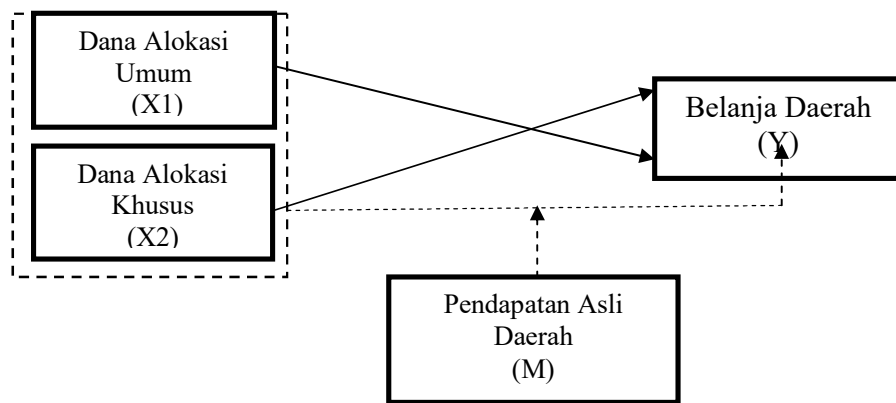
Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah mencakup berbagai sumber seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Flypaper Effect

Istilah dari *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikan pemikiran “money sticks where it hits”. *Flypaper Effect* sebagai fenomena utama dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan dana transfer yaitu DAU dan DAK untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan potensi sendiri, yaitu PAD.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka hubungan antar variabel akan ditunjukkan dalam model penelitian berikut ini :



Gambar 1. Model/Skema Penelitian

Keterangan :

- a. ——— = Parsial
- b.----- = Simultan

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, berikut hipotesis mengenai *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi yaitu :

- H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah
- H₂ : Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
- H₃ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah
- H₄ :Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana alokasi umum secara signifikan terhadap belanja daerah
- H₅ :Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana alokasi khusus secara signifikan terhadap belanja daerah
- H₆ :Dana alokasi umum, dana aloaksi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah berupa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014-2021 di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi mengenai Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014-2021 di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga jumlah pengamatan sebesar 8 tahun. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berupah data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah di dokumentasikan yang dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

III. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-435.192	429.577		-1.013	.368
1 DAU	3.139	1.605	.878	1.956	.122
DAK	.571	.867	.165	.658	.547
PAD	.708	3.654	.073	.194	.856

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = -435,192 + 3,139DAU + 0,571DAK + 0,708PAD$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta -435,192 memiliki arti apabila DAU, DAK dan PAD tetap, maka Belanja Daerah akan menurun sebesar -435,192.
2. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 3,139 memiliki arti apabila DAU naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 3,139 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi DAK sebesar 0,571 memiliki arti apabila DAK naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0,571 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,708 memiliki arti apabila PAD naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0,708 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 3. Hasil Uji MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	540.407	182.690		2.958	.032
	DAU	2.877	.774	.804	3.717	.014
	DAK	.618	.747	.179	.827	.446
	PAD	1.020	.810	.133	1.123	.378
	DAU_PAD	.008	.005	.573	1.672	.155
	DAK_PAD	.009	.009	.352	1.027	.352

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 540,407 + 2,887DAU + 0,618DAK + 1,020PAD + 0,008DAU_PAD + 0,009DAK_PAD$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta 540.407 memiliki arti apabila DAU dan DAK tetap, maka Belanja Daerah akan menurun sebesar 540.407.
2. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 2,877 memiliki arti apabila DAU naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 2,887 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi DAK sebesar 0,618 memiliki arti apabila DAK naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0,618 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 1,020 memiliki arti apabila PAD naik sebesar satu satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 1,020 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
5. Nilai koefisien regresi DAU_PAD sebesar 0,008 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Pendapatan Asli Daerah, maka pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah meningkat.
6. Nilai koefisien regresi DAK_PAD sebesar 0,009 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Pendapatan Asli Daerah, maka pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah meningkat.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji secara parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	540.407	182.690		2.958	.032

	DAU	2.877	.774	.804	3.717	.014
	DAK	.618	.747	.179	.827	.446
	PAD	1.020	.810	.133	1.123	.378
	DAU_PAD	.008	.005	.573	1.672	.155
	DAK_PAD	.009	.009	.352	1.027	.352
a. Dependent Variable: BD						

Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Berikut hasil pengujian secara parsial menggunakan uji t yang nilainya akan dibandingkan dengan signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,717 dengan tingkat signifikan sebesar 0,014 yang berada lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini dapat di terima.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,827 dengan tingkat signifikan sebesar 0,446 yang berada lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini ditolak.
3. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,020 dengan tingkat signifikan sebesar 0,378 yang berada lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini ditolak.
4. Variabel moderasi pertama antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,672 dengan tingkat signifikan sebesar 0,155 yang berada lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini dapat ditolak.
5. Variabel moderasi pertama antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,027 dengan tingkat signifikan sebesar 0,352 yang berada lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini ditolak.

Uji F (Uji secara simultan)

Tabel 5. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24314415494474	2	12157207747237346	8.077	.027 ^b
Residual	692000000.000	5	000000.000		
Total	752612213448154	7	1505224426896309		
	9000000.000		700000.000		
	31840537628956				
	240000000.000				

- a. Dependent Variable: BD
 b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK
 Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa analisis uji simultan dalam penelitian ini memiliki nilai F_{hitung} sebesar $8.077 > F_{tabel}$ 5,14 dengan nilai signifikan 0,027. Karena nilai signifikan $< 0,05$ sehingga variabel dalam penelitian ini mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.563	.468	122.79663

- a. Predictors: (Constant), DAK_PAD, DAU, DAK, DAU_PAD, PAD
 Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan hasil nilai R Square (R^2) adalah sebesar 0,563 atau 56,3% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, yang berarti H_1 diterima. Hasil ini ditandai dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,717 dengan tingkat signifikan sebesar 0,014 yang berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Dalam penelitian ini sumber pendanaan Dana Alokasi Umum Aceh Tamiang berasal dari APBD. hubungan dengan Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang disini, pengeluaran Belanja Daerah mencakup dari pembangunan sarana dan prasarana serta belanja pegawai daerah. Jika Dana Alokasi Khusus tidak mencukupi dalam pembangunan sarana dan prasarana serta belanja pegawai daerah, maka akan timbulnya Dana Alokasi Umum untuk pemerataan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unun Dian Anggraeni, Suhardjo (2013), yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Dengan pemahaman bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji parsial antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang belum sesuai dengan Belanja Daerah kabupaten Aceh Tamiang. Berhasil dibuktikan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah berarti H_2 ditolak. Hasil ini ditandai dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,827 dengan tingkat signifikan sebesar 0,446 yang berada lebih besar dari $\alpha=(0,05)$. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan publik. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat maka semakin besar juga Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan asumsi tersebut maka secara teoritis dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, namun dalam penelitian ini terbukti bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus masih belum sesuai pelaksanaannya, sehingga Dana Alokasi Khusus yang di lontarkan belum mampu untuk memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nuryadin dan Sri (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus yang belum secara langsung digunakan untuk membangun, namun hanya untuk memelihara sehingga Dana Alokasi Khusus belum cukup efektif dalam upaya mencapai sasaran prioritas nasional yang menjadi bagian dari urusan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji parsial antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu membiayai Belanja Daerah kabupaten Aceh Tamiang. Berhasil dibuktikan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini ditandai dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,020 < t_{tabel}$ sebesar 2,571 dengan tingkat signifikan sebesar 0,378 yang berada lebih besar dari $\alpha=(0,05)$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan hipotesis pada penelitian ini H_3 ditolak. Dalam penelitian ini terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyebab pertama, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Kedua, sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketiga, daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan. Keempat, daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan. Kelima, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi

Berdasarkan uji parsial antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi, hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Berhasil dibuktikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,672 dengan tingkat signifikan sebesar 0,155 yang berada lebih besar dari $\alpha=(0,05)$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum pada alokasi Belanja Daerah, yang berarti H_4 ditolak. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, hal ini perlu dilakukan agar tujuan dibangunnya fasilitas publik tersebut tercapai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar (2012) yang menyebutkan secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi

Berdasarkan uji parsial antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi. Berhasil dibuktikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,027 dengan tingkat signifikan sebesar 0,352 yang berada lebih besar dari $\alpha=(0,05)$. Sehingga dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus pada alokasi Belanja Daerah, yang berarti H_5 ditolak. Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatannya, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ricky Surya Hadi (2017) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi khusus pada belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri dalam melakukan aktivitas pemerintah dan dalam menjalankan program-program pemerintah daerah, karena masih bergantung pada transfer dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi

Berdasarkan uji simultan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai pemoderasi hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Berhasil dibuktikan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai F_{hitung} $8,077 > F_{tabel}$ 5,14 dengan nilai

signifikan 0,005. Karena nilai signifikan $< \alpha = (0,05)$. Sehingga variabel dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang berarti H_6 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Santika Adhi Karyadi (2017) yang menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah agar semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah seperti mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja daerah.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara parsial pendapatan asli daerah tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi umum pada belanja daerah di kabupaten Aceh Tamiang. Secara parsial pendapatan asli daerah tidak dapat memoderasi hubungan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di kabupaten Aceh Tamiang. Terakhir dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Saran

Bagi pemerintah kabupaten Aceh Tamiang ke depannya, agar lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan mampu membiayai Belanja Daerah itu sendiri. Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang harus lebih memahami bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat hanyalah sebagai pemicu kemandirian suatu daerah sebagai langkah awal keberhasilan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain misalnya Dana Bagi Hasil atau Dana Perimbangan lainnya.

V. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Chatib, Munif. (2014). *Gurunya Manusia*. Bandung: Khaifa.
- Courant, Paul, Edward Gramlich and Daniel Rubinfeld. 1979. *The Stimulative Effects Of Intergovernment Grants: Or Why Money Stick Where It Lands*, In: Peter Miezkowski And Wiliam Oakland, Eds. Fiscal Federalism Ang Grants In Aid (The Urban Institute, Washington) 5-22.

- Kuncoro, Mudrajat. (2007). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang: 1-27.
- Purbarini, Endah dan Gregorius N. Masdjojo. 2015. *Flypaper Effect pada Belanja operasidan Belanja Modal dari Pemerintahan Kota di Indonesia*. Jurnal EkonomiPembangunan:Hal. 75-84.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. 2015.**Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.